

**KONFIGURASI POLITIK DALAM PENENTUAN
ELECTORAL THRESHOLD
DALAM UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA
SATU ILMU HUKUM**

**Oleh:
ANWAR AMIEN
NIM : 12340152**

**PEMBIMBING:
NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.HUM.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Penentuan ketentuan partai politik sebagai peserta dalam pemilu (*Electotal Threshold*), merupakan salah satu isu yang sangat menarik, di satu sisi *electoral threshold* dinilai sebagai konsekuensi logis dan objektif dalam menjalankan sistem multi-partai sederhana, bertujuan untuk memperkuat basis-basis partai politik, menertibkan jumlah partai agar tidak membludak dan mengganggu penyelenggaraan negara yang demokratis. Namun di sisi lain, pembatasan jumlah partai justru dinilai sebagai pelanggaran terhadap konstitusi yang menjamin hak dasar seseorang dalam membentuk partai. Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun ingin mengangkat tema **Konfigurasi Politik dalam Penentuan *Electoral Thresold* dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu** untuk mengetahui perjalanan *electoral threshold*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik dengan menganalisis secara kualitatif (*content analysis*). Untuk objek dari penelitian ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan bagaimana konfigurasi politik dalam penentuan *electoral threshold* dalam UU No. 7 Tahun 2017.

Setelah melakukan penelitian ini penyusun menemukan konfigurasi politik dalam penentuan aturan *electoral threshold* bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ditentukannya ambang batas partai sebesar 4 persen disetujui oleh Fraksi Partai PDIP, GOLKAR, NASDEM, PPP dan HANURA. Setelah melakukan kesepakatan dan diskusi sangat panjang antar farksi-fraksi partai yang berada di parlemen, maka kemudian disepakatilah ambang batas partai sebagai salah satu syarat partai politik untuk lolos dan mengikuti pemilu selanjutnya

Konsekuensi yang diberikan dengan adanya penetapan ambang batas tersebut adalah, setiap partai yang tidak dinyatakan lolos parlemen maka, dalam pemilu selanjutnya dapat mengikuti pemilu dengan catatan berstatus seperti partai baru. Adanya implementasi yang sedemikian sebenarnya tidak memberikan efek yang signifikan pada partai politik baik yang baru mengikuti kontestasi maupun yang sudah lama. Sebab konsekuensi dari aturan ambang batas dapat dispensasi pada pemilu selanjutnya.

Kata kunci: Konfigurasi Politik, Electoral Threshold, Pemilu.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Amien
NIM : 12340152
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“KONFIGURASI POLITIK DALAM PENENTUAN ELECTORAL THRESHOLD DALAM UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU”** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang dilakukan oleh saya sendiri atau bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Yogyakarta, 23 Agustus 2019


ANWAR AMIEN
NIM. 12340152



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anwar Amien

NIM : 12340152

Judul Skripsi : "Konfigurasi Politik dalam Penentuan Electoral Threshold dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu dalam bidang Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami harap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 23 Agustus 2019

Pembimbing

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum
1975 1010 200501 2005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-443/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : KONFIGURASI POLITIK DALAM PENENTUAN ELECTORAL TRHESHOLD
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANWAR AMIEN
Nomor Induk Mahasiswa : 12340152
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II

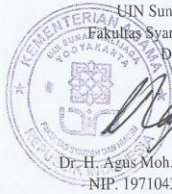
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 27 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“BERJUANG DAN BERDOALAH KARENA TIDAK
ADA YANG MUSTAHIL”

HALAMAN PERSEMBAHAN

**DENGAN SEGALA KERENDAHAN HATI, SKRIPSI INI SAYA
PERSEMBAHKAN**

KEPADA:

**ABAH SAYA DRS. TKG. H. SYAKIRIN DAN MAMAK SAYA
HJ. ABIDAH, TERIMA KASIH YANG TAK TERHINGGA
ANANDA SAMPAIKAN ATAS SEGALA KESABARAN DAN
NASIHAT HIDUP YANG KALIAN BERIKAN. SEMOGA
SKRIPSI INI BISA JADI PINTU AMPUNAN DAN MAAF ATAS
SEGALA KESALAHAN YANG ANANDA LAKUKAN SELAMA
INI, SEMOGA ALLAH SELALU MELINDUNGI ABAH DAN
MAMAK.**

**DAN TERUNTUK ADIK-ADIKKU: WAHYU JAWADUL ILHAMI,
MUHAMMAD IMAM AL AZIZ, MUHAMMAD AZKIA'
UNNI'AMILLAH DAN AHMAD FAUZAN ARAFA TERIMAKASIH
ATAS DOA-DOA DAN DUKUNGAN YANG KALIAN
SAMPAIKAN SEHINGGA SELESAI STUDI INI, SEMOGA KITA
SEMUA SELALU DALAM LINDUNGAN ALLAH.**

**TERUNTUK SEGENAP DOSEN FAKULTAS SYARIAH TERIMA
KASIH TELAH MEMBIMBING SAYA SAMPAI AKHIR,**

**DAN TERIMA KASIH SEBANYAK-BANYAKNYA KEPADA
KAPRODI DAN SEKPRODI ILMU HUKUM, BAPAK FAISAL
LUQMAN HAKIM DAN IBU NURAINUN MANGUNSONG ATAS
BANTUAN DAN BIMBINGANNYA, SEMOGA ALLAH
MELINDUNGI BAPAK DAN IBU**

**TERUNTUK TEMAN-TEMAN SEKALIAN, KALIAN ADA
DIBAGIAN TERSENDIRI DI HALAMAN SELANJUTNYA.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran ALLAH S.W.T atas Rahmat dan hidayah Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konfigurasi Politik Dalam Penentuan *Electoral Threshold* Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu” . Shalawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada jungjungan Nabi Muhammad S.A.W sebagai suri teladan bagi umat muslim.

Dalam penyusunan skiprisi ini tentu saja tidak lepas dari segala bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, MA., Ph. D selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. dan Ibu Nurainun Mangungsong, S.H ., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah secara ikhlas meluangkan waktu untuk dapat memberikan arahan dan membagikan ilmunya kepada saya selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Program Studi Ilmu Hukum yang telah mengenalkan, membekali, membimbing dengan Ilmu yang telah diberikan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum.
7. Bapak R. Sunaryo, selaku Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum yang dengan sabar dan telaten membantu penyusun dalam penyelesaian administrasi.
8. Bapak Dr. Waryono selaku wakil rektor III yang selalu bersedia menasehati dan mengarahkan saya sampai saya menyelesaikan studi ini.
9. Kedua orang tua saya, Abah Drs. Tgk. H. Syakirin dan mamak Hj. Abidah yang telah selalu membimbing dan mendoakan saya anaknya supaya menjadi anak yang shaleh.

10. Teruntuk semua adik-adikku yang dijogja, Wahyu, Aziz, Azkia, Fuzan, Alun dan Shahib juga terima kasih banyak atas doa dan dukungan dari kalian untuk saya.
11. Seluruh keluarga besar saya dari abah maupun keluarga dari mamak yang senantiasa membantu membimbing dan memotivasi dalam segala hal.
12. Teman-teman seperjuangan selama menjalani studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Rozzy Dirgantara Putra, S.H., Ahmad Satria Fatawi, S.H., Muhammad Rujaini Tanjung, S.H., Ria Dhama Puja, S.H., Roni Zulfiansyah, S.H., Aidhil Ilham Arafah, S.H., Riza Budiarto, S.H., Ahlih Chanawa, S.H., Toto Iswanto, S.H., Sidik Nurmanjaya, S.H., Faisal Harahap, S.H., Muhammad Rofiq Firdaus, S.H., Abdul Ghofur, S.H., Ari Priyo, S.H., Enon Kosasi, S.H., Agung Laksito, S.H., Asep Nano, S.H., Nurul Arifin, S.H., Sugeng Widodo, S.H., Fajar Aprianto, S.H., Tsabit Abdullah, S.H., Purnawanti, S.H., Iklil Basya, S.H., Muhammad Nafis Ilhami, S. Hum. Terima kasih kepada kalian semua atas bantuan dan dukungannya.

13. Seluruh teman-teman Organisasi IKAMARA, Organisasi TPA, Smile Cooffee and Tea, Organisasi PSKH, KONTRAKAN LIMIT dan teman-teman yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penyusun menerima kritik dan saran yang dapat membantu penyusunan skripsi ini. Besar harapan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu khususnya dalam bidang hukum.

Yogyakarta, 23
Agustus 2019
penyusun

Anwar Amien
NIM. 12340152

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| HALAMAN MOTTO..... | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 17 |
| C. Tujuan Penelitian | 17 |
| D. Telaah Pustaka | 17 |
| E. Kerangka teoritik | 20 |
| F. Metode Penelitian | 27 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 30 |

**BAB II PEMLIHAN UMUM SEBAGAI
DEMOKRASI DI INDONESIA 31**

| | |
|--|----|
| A. Demokrasi Dalam Sistem Ketata Negaraan di Indonesia..... | 31 |
| 1. Pengertian dan Perkembangan Demokrasi | 31 |
| 2. Elemen-Element Demokrasi | 39 |
| 3. Tinjauan Umum Demokrasi di Indonesia | 44 |
| 4. Pemilihan Umum..... | 50 |

**BAB III PARTAI POLITIK DAN PERJALANAN
KONFIGURASI POLITIKNYA DI
INDONESIA 57**

| | |
|--|----|
| A. Parta Politik..... | 57 |
| 1. Pengertian Partai Politik | 57 |
| 2. Partai Politik Pasca Amandemen..... | 61 |
| 3. Infrastruktur Politik | 65 |
| B. Konfigurasi Politik..... | 68 |
| 1. Masa Orde Lama | 69 |
| 2. Masa Orde Baru..... | 79 |
| 3. Masa Pasca Reformasi..... | 86 |

**BAB IV ANALISIS KONFIGURASI POLITIK
DALAM PENENTUAN *ELECTORAL*
THRESHOLD DALAM UU NO. 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILU 94**

Regulasi Politik Pembentukan UU No. 7
Tahun 2017 Tentang pemilu94

BAB V PENUTUP 129

A. Kesimpulan..... 129

B. Saran..... 131

DAFTAR PUSTAKA 133

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi telah menjadi istilah yang sangat diagungkan dalam sejarah pemikiran manusia tentang tatanan sisio-politik yang ideal. Bahkan, mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh.¹ Kedudukan yang sentral dari demokrasi ini telah meluluhlantakkan teori-teori lainnya mengenai tatanan kekuasaan yang baik, yang pernah ditawarkan oleh kalangan filsuf, ahli, hukum, dan pakar ilmu politik hingga awal milenium ketiga ini. Kepercayaan yang kuat atas sempurnanya teori politik demokrasi belum dapat tergoyahkan secara filosofis, sosiologis, maupun dalam format yuridis ketatanegaraan. Kedudukan sentral ini bahkan semakin menguat diiringi dengan konsep-konsep lain di belakangnya, seperti *human rights*, *civil society*, maupun konsep *good governance*, yang pada akhirnya menegaskan

¹ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara, 2006, hlm. 1.

posisi teori demokrasi sebagai konsep terbaik yang pernah dicapai oleh pemikiran manusia.²

Demokrasi diyakini sebagai gagasan universal yang dapat diterima dalam ragam perspektif. Demokrasi telah menjadi obsesi sejumlah masyarakat non-Barat semenjak awal abad ke-20. Banyak jajahan Barat di Asia dan Afrika yang mulai bergerak untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi di dalam masyarakat. Dengan ”senjata” demokrasi yang diperoleh melalui pendidikan Barat, para pemuka masyarakat wilayah jajahan ingin mengembangkan nilai demokrasi yang akan digunakan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Di zaman penjajahan Belanda, gejala seperti ini di Indonesia populer dengan istilah Kebangkitan Nasional.³

Adapun gambaran semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir di seluruh belahan dunia, gerakan demokratisasi kehidupan politik telah menjadi fenomena yang tidak terelakkan dalam mengubah persepsi sejarah tentang bagaimana menyelenggarakan kekuasaan secara etis, rasional, dan bertanggung jawab. Jelas, bahwa demokrasi mempunyai potensi untuk memberikan yang terbaik bagi manusia (rakyat), terutama dalam melindungi hak-hak individu dalam menghadapi kekuasaan-kekuasaan yang lebih perkasa, seperti kekuasaan negara dan pemerintah.

² *Ibid*, hlm. 2.

³ *Ibid*, hlm. 2.

Huntington memperlihatkan bagaimana proses yang menghapuskan segala bentuk pemerintahan yang tidak demokratis ataupun antidemokratis, yang kemudian menegaskan bentuk pemerintahan serta sistem politik yang demokratis.⁴

Di Indonesia, penerapan demokrasi dalam arti yang sebenarnya paling tidak teridentifikasi telah dilakukan beberapa kali, yaitu pemerintahan pertama yang diterapkan tepat beberapa saat ketika masa kolonial berakhir pada Orde Lama, Orde Baru dan masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Dalam perjalanan sistem ini, keinginan meletakkan negara dalam kekuasaan (kedaulatan) rakyat, dinilai berjalan sesuai dengan konsepnya walaupun segudang persoalan masih menyelimuti. Persoalan-persoalan ini secara umum disebabkan oleh pemahaman terhadap konsep demokrasi yang minim sehingga terkesan rakyat dan birokrat tidak siap melaksanakan. Efek negatif lain, perdebatan seputar demokrasi terkait dengan berbagai elemen penting demokrasi kerap mengaburkan tujuan yang ingin dicapai demokrasi itu sendiri, yaitu mensejahterakan rakyat. Para birokrat dan elit politik terlalu sering berlarut-larut dalam perdebatan dan persidangan sementara masyarakat berada dalam ketimpangan yang berkepanjangan. Tidak hanya

⁴ Robert A. Dahl, *Demokrasi Ekonomi*, jilid II, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1992 hlm. 24.

berkurat pada dataran implementasi dari konsep demokrasi yang sudah ada, namun, antar para elit itu tidak jarang juga memperdebatkan konsep demokrasi sendiri, seperti dalam hal penyesuaian pelaksanaan elemen-elemen penting demokrasi. Di antara elemen terpenting demokrasi yang dimaksud itu adalah Pemilihan Umum dan Partai Politik sebagai pesertanya. Dua elemen ini dinyatakan sebagai pilar demokrasi, sehingga tidak ada demokrasi tanpa ada Pemilu dan Parpol.⁵

Arti penting dari keduanya dapat dilihat dengan berbagai macam cara, seperti mendalami fungsi keberadaan Parpol dan apa fungsi penyelenggaraan Pemilu. Secara umum, fungsi partai politik adalah memberi pemahaman politik kepada rakyat serta mendidik dan mempersiapkan generasi penerus bangsa sesuai dengan harapan rakyat secara keseluruhan. Sementara Pemilu adalah sarana mewujudkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya yang ditampilkan untuk dipilih itu.

Mereka yang terpilih melalui pemilu kemudian diharuskan memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas, tidak bertindak hanya berdasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok saja. Maka, pemilu dan parpol kemudian

⁵ A. Ubaidillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan The Asia Foendation, 2006, hlm. 300.

menjadi elemen mutlak dalam penerapan konsep demokrasi modern (kontemporer). Sebab, dengan kedua elemen ini demokrasi perwakilan dapat diwujudkan dengan baik.⁶ Joseph Schumpeter bahkan menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik untuk dapat disebut sebagai sebuah pemerintahan demokratis. Dalam khazanah demokrasi kontemporer posisi pemilihan umum memperoleh penguatan.⁷

Kajian akademis mengenai demokrasi mengenal dua kategorisasi pemaknaan besar, yaitu konsepsi minimalis dan maksimalis. Demokrasi minimalis atau dalam wacana di Indonesia lebih dikenal dengan peristilahan demokrasi prosedural dikenakan kepada sistem-sistem politik yang melaksanakan perubahan kepemimpinan secara reguler melalui suatu mekanisme pemilihan yang berlangsung bebas, terbuka, dan melibatkan massa pemilih yang universal (tanpa pembedaan ras, agama, suku, dan gender). Bagi konsepsi maksimalis pelaksanaan pemilihan umum saja tidaklah cukup bagi suatu sistem politik untuk mendapatkan gelar demokrasi, karena konsepsi ini (yang di Indonesia lebih dikenal dengan peristilahan demokrasi substantif) mensyaratkan

⁶ Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 292-294.

⁷ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 7-8.

penghormatan terhadap hak-hak sipil yang lebih luas dan penghargaan terhadap kaidah-kaidah pluralisme yang mendasar.

Bila dilihat lebih jauh, kedua konsepsi tersebut menjadikan pemilihan umum sebagai prasyarat bagi demokrasi. Karenanya, sebuah rezim yang menjamin pluralitas dan hak-hak sipil tapi tidak melakukan pergantian kekuasaan secara reguler melalui pemilihan umum tidak dapat mengklaim dirinya sebagai sebuah demokrasi. Walaupun akhir-akhir ini terdapat serangkaian kritik terhadap pendapat yang mengedepankan prosedur demokrasi ini, posisi Pemilu tetap dipandang sentral dalam wacana demokrasi.

Wacana konsolidasi kemudian menjadi pokok baru yang menarik dikaji. Bila digambarkan sebagai sebuah spektrum, konsolidasi akan mengentalkan warna demokrasi dari kategori minimalis yang berwarna muda menuju ke arah maksimalis yang berwarna lebih pekat. Kepentingan konsolidasi biasanya kerap diterapkan pada negara-negara yang baru saja meninggalkan otoritarianisme menuju ke demokrasi.⁸ Tat kala negara-negara ini menempuh jalan panjang ke arah demokrasi, langkah pertama yang lazim ditempuh adalah langkah-langkah minimalis, seperti menyelenggarakan pemilihan umum yang terbuka, bebas dan

⁸ *Ibid*, hlm. 8.

adil, dan pemberian hak-hak politik dasar kepada seluruh warga negara tanpa perkecualian yang didasarkan pada ras, agama, dan gender. Untuk menuju ke arah demokrasi maksimalis, konsolidasi demokrasilah jalannya. Penerapan konsolidasi hanya pada negara-negara demokrasi baru sebenarnya agak salah kaprah karena demokrasi sesungguhnya adalah sebuah proses yang tak henti. Sebuah politas yang demokrasinya dipandang telah terkonsolidasi dapat saja mengalami arus balik yang membahayakan posisi si demokrasi itu sendiri. Hal ini terlihat nyata terjadi bukan hanya di Indonesia, demokrasi maksimalis (substantif) ternyata belum juga terwujud bahkan di Amerika Serikat sebagai pencetus konsep demokrasi kontemporer.

Hal seperti ini tentu tidak bertujuan menimbulkan pesimistis bagi negara mana saja yang hendak menerapkan sistem demokrasi, dimana rakyat menjadi pemegang kedaulatan penuh, dan tujuan mulia yang ada di dalam konsep demokrasi mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat, masyarakat madani, atau yang populer juga dengan istilah *civil society*.⁹ Di Indonesia sendiri, pengakhiran rezim yang menerapkan sistem selain demokrasi berakhir manis dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Artinya, bahwa dalam

⁹ A. Ubaidillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan The Asia Foundation, 2006, hlm. 302.

konsep demokrasi tidak dapat dipandang obyektif dengan satu rumusan baku, melainkan substansi sistem demokrasi lah yang hendak diwujudkan.

Sejauh ini, pemilu bagi Indonesia menjadi satu pesta rakyat untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang dijalankan, atau paling tidak sebagai perbaikan bagi elit pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan demokratis yang meletakkan Pemilu sebagai salah satu elemen pokok dalam pemilihan kepala pemerintahan, menjadi cacatan penting dan menarik untuk terus diikuti. Pengaturannya yang sering berubah-ubah memberi kesan bahwa konsep demokrasi klasik juga harus ditinjau kembali ketika hendak diterapkan di suatu negara.¹⁰ Dengan kata lain, terdapat hal-hal yang tidak sesuai untuk diterapkan di suatu negara, walaupun hal itu telah populer penerapannya di banyak negara lain. Realita menunjukkan bahwa Pemilu yang telah sembilan kali dilaksanakan di Indonesia, mengalami perubahan dan pengembangan substansi konsep dari sebelumnya. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, penyusunan "aturan main" dalam pelaksanaan pemilu, dominan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan penguasa. Termasuk pemanfaatan partai politik sebagai salah

¹⁰ Baca dalam Sufriadi, *Demokrasi*, makalah diskusi internal Ikatan Mahasiswa dan Masyarakat Aceh Tenggara, Yogyakarta, 20 Maret 2009.

satu medianya.¹¹ Maka, tidak heran ketika mengamati UU Pemilu dan UU perpolitikan lainnya, pada masa Orde Baru dan Orde Lama, dengan mudah dapat ditemukan pasal-pasal ”miring”, karena memang sengaja dikonstruksi demikian oleh penguasa pada saat itu.¹²

Berakhirnya periode Orde Baru dan terbukanya pintu gerbang reformasi ditandai dengan perombakan fundamental sistem politik dalam penyelenggaraan negara. Gerakan reformasi tampaknya telah menghadirkan perubahan yang cukup signifikan. Di antara yang paling menonjol adalah perombakan undang-undang kepartaian yang memberikan peluang bagi warga negara untuk mendirikan partai politik.¹³ Selain dalam hal kepartaian, undang-undang pemilu sebagai salah satu jalur penciptaan negara demokratis juga direvisi total ketika masuk masa reformasi. Sebagaimana undang-undang kepartaian, diterbitkannya undang-undang pemilu pada tahun 1999 sampai dengan diperaharuinya undang-undang pemilu tahun 2017 juga otomatis disambut gembira

¹¹ Syarif Nur Hidayat, dkk., *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*, makalah diskusi kelas pada mata kuliah Politik Ketatanegaraan, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Februari 2007, hlm. 1.

¹² M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*, Jakarta, CV. Rajawali, 1983, hlm. 172-173.

¹³ M. Imadudin Rahmat dkk, *Partai-partai Islam; Tarnsformasi Gerakan Islam Dan Ruang Demokrasi*, dalam *Tashwirul Afkar* edisi no.4, t.tp.: 1999, hlm. 7.

masyarakat Indonesia, karena pemilu yang akan dilaksanakan selanjutnya (paling tidak), sudah tidak dapat lagi dimonopoli oleh kalangan tertentu pada era reformasi ini.

Adapun dalam perjalanannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang muncul pertama pasca berakhirnya rezim Orde Baru, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum ini kembali disempurnakan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Penerbitan itu tepat ketika Pemilu tahun 2004 mulai gencar dikampanyekan. Selanjutnya undang-undang tersebut disempurnakan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Dan yang terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mana undang-undang ini dijadikan rujukan peraturan pemilu tahun 2019, sehingga dalam rangka mewujudkan sistem demokrasi "ala Indonesia" yang lebih teratur, maka aturan tersebut mesti selalu disesuaikan dengan kondisi *up to date* di masyarakat.

Secara umum, setiap penyempurnaan aturan tentang penyelenggaraan Pemilu, arah penyempurnaan tidak pernah lepas jauh dari delapan itu. Namun, arah penyempurnaan penataan partai politik sebagai peserta pemilu tampaknya

mendapat porsi terbesar dalam wacana perdebatan para elit. Penentuan ketentuan partai politik sebagai peserta dalam pemilu (*electoral threshold*), salah satu isu yang masuk dalam lingkaran ini, di satu sisi dinilai sebagai konsekuensi logis dan objektif dalam rangka menyelenggarakan sistem multi-partai sederhana, bertujuan untuk memperkuat basis-basis partai politik, menertibkan jumlah partai agar tidak membludak dan mengganggu penyelenggaraan negara yang demokratis, dan alasan lainnya. Namun di sisi lain, pembatasan jumlah partai justru dinilai sebagai pelanggaran terhadap konstitusi yang menjamin hak dasar seseorang dalam membentuk partai. Dalam banyak pemberitaan, perdebatan seputar penentuan batas minimal yang harus dipenuhi parpol tersebut pada awal tahun 2018 telah menggiring perhatian publik untuk melihat panasnya pertarungan politik di gedung dewan. Konfigurasi politik dalam menentukan persentase peserta pemilu 2019 bagi parpol ini menunjukkan keseimbangan kekuatan politik yang bermain. Jika merujuk pada konsep Moh. Mahfud MD yang menyatakan bahwa hukum ditentukan oleh (konfigurasi) politik ketika pembentukan hukum dilakukan, maka suasana semacam pembentukan UU Pemilu seharusnya melahirkan hukum yang responsif. Produk hukum yang responsif menyimpulkan hukum terlahir dengan segenap aspirasi dan

kebutuhan rakyat tercantum di dalamnya.¹⁴ Tapi ternyata hasil yang telah ditetapkan itu tidak sedikit mendapat kecaman dari banyak kalangan.

Setiap periode pemerintahan memiliki tatanan hukum dan model pemerintahannya sendiri, sejak Orde Lama hingga pasca Reformasi seperti saat ini. Regulasi peraturan, kebijakan dan sistem pemerintahan tidak akan pernah terlepas dari situasi politik dan hukum yang ada di negara ini, meskipun sejatinya politik juga bergantung terhadap produk hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini lah yang dimaksud oleh Mahfud MD dalam buku *Konfigurasi Politik Hukum di Indonesia*, bahwa politik determinan terhadap hukum, dan hukum determinan terhadap politik. Artinya, keduanya saling ketergantungan dan berpengaruh dalam penerapannya.

Di sisi lain konfigurasi politik adalah kekuatan-kekuatan politik yang nyata dan eksis dalam suatu sistem politik. Konfigurasi politik ini biasanya tergambar dalam wujud partai-partai politik. Bila partai-partai politik ini berperan secara nyata dalam sistem politik yang berlaku dalam mengambil kebijakan (keputusan) seperti pembentukan hukum atau kebijakan lainnya, maka disebutkan konfigurasi politik seperti ini tergolong pada konfigurasi politik yang demokratis. Sedangkan jika partai

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 1998, hlm. 13-23.

politik yang ada tidak dapat berperan dalam menentukan keputusan atau menentukan kebijakan itu, maka konfigurasi politik macam ini disebut non-demokratis.¹⁵

Hukum dan politik merupakan subsistem dalam sistem kemasyarakatan. Masing-masing melaksanakan fungsi tertentu untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan dalam konteks kenegaraan. Secara garis besar, hukum berfungsi melakukan *social control*, *dispute settlement* dan *social engeneering* atau *inovation*. Sedangkan fungsi politik meliputi pemeliharaan sistem dan adaptasi (*socialization* dan *recruitment*), konversi (*rule making*, *rule application*, *rule adjudication*, *interest articulation* dan *aggregation*) dan fungsi kapabilitas (*regulative extractif*, *distributive* dan *responsive*). Sementara politik berfungsi untuk menciptakan suatu interaksi (saling mempengaruhi) antara bentuk struktur atau lembaga dalam masyarakat yang keseluruhannya (supra dan infra struktur) merupakan struktur politik yang masing-masing melaksanakan fungsi “*in-put*” dan “*out-put*”. Terkait hal ini, Miriam Budiardjo mendefinisikan politik dengan berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem (negara) dan bagaimana melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dari sini, politik akan selalu

¹⁵ Bintan Ragen Saragih, *Politik Hukum*, Bandung, CV. Utomo, 2006, hlm. 33.

menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*), dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*).¹⁶

Dengan fungsi hukum dan politik yang demikianlah, dalam pembuatan suatu aturan (hukum) selalu dituntut kontribusi moralitas mulia bagi para pihak yang secara langsung terlibat di dalamnya.¹⁷ Sebab walau bagaimanapun, perjalanan perpolitikan dan bagus atau buruk realisasinya di masyarakat, hukum yang telah terbentuk itu lebih dominan menentukannya.

Sementara *Electoral Threshold* (ET) dalam kancah pembahasan ilmu hukum terbilang jarang ditemukan, terlebih pengkajian yang mendalam tentangnya. Materi ini banyak dikaji oleh mereka yang bergelut dengan ilmu politik, sesuai bidang yang dikaji di dalamnya. Bahkan, dalam referensi ilmu politik pun, kajian mengenai materi ini terlihat kurang dan jarang ditemui menjadi satu bab khusus pembahasan tentangnya. Hal ini disebabkan (paling tidak) karena materi ini bersifat musiman (temporer), dengan arti kata, baru akan dibicarakan panjang lebar dan “diributkan” ketika pembahasan revisi UU Pemilu yang biasanya dilakukan kurang lebih lima tahun sekali menjelang Pemilu. Selain itu,

¹⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, Cet. XIV. hlm. 53.

¹⁷ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006, hlm. 45-55.

pembatasan partai politik melalui ET baru ditemukan di UU Pemilu tahun 1999.¹⁸

Secara definitif, istilah ET dapat diartikan dengan ambang batas perolehan kursi dari partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya. ET dalam hal ini menjadi salah satu syarat (ketentuan) bagi partai politik untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya. Dengan kata lain, satu partai politik baru dapat mengikuti pemilu berikutnya jika pada pemilu sebelumnya dapat memenuhi ketentuan (persentase) suara pemilih yang telah ditentukan dalam UU Pemilu terbaru itu.

Dalam perjalanannya, istilah ini sering dibandingkan dengan istilah *Parliamentary Threshold* (PT) yang tidak jarang juga menimbulkan kebingungan bagi banyak orang, termasuk kalangan akademisi. PT sendiri dapat diartikan dengan ambang batas bagi partai politik untuk dapat mendudukkan anggotanya di parlemen (DPR).

Kedua konsep pembatasan (penyederhanaan) terhadap partai politik ini sering disalahpahami dalam hal prakteknya. Dalam penerapannya di Indonesia, ET sering dipersepsikan sebagai penerapan konsep PT, sebab hasil akhir yang diciptakan sama, yaitu partai politik tidak dapat mendudukkan wakilnya di parlemen karena tidak dapat memenuhi persentase yang telah ditentukan. ET, sejatinya

¹⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

adalah batas minimal suatu partai atau orang untuk memperoleh kursi (wakil) di parlemen. Maksudnya, agar orang atau partai itu mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil karena mendapat kekuatan memadai di lembaga perwakilan. Namun, di Indonesia, *threshold* dimaknai berbeda, yakni batas minimal perolehan suara suatu partai untuk bisa mengikuti pemilu berikutnya.

Namun, yang jelas, perbedaan antara kedua konsep tersebut terletak pada eksistensi keberadaan partai politik yang tidak mampu memenuhi prosentase yang ditentukan itu. Pada PT, partai politik yang tidak mencapai jumlah wakil tertentu, maka wakil partai tersebut tidak dapat duduk di parlemen. Tetapi partainya tetap bisa mengikuti pemilu mendatang tanpa harus mengganti identitas. Sementara dalam konsep ET, partai politik yang tidak memenuhi persentase yang ditentukan maka partai tersebut tidak dapat duduk di parlemen, partai itu juga harus mengganti identitas partai atau bergabung dengan partai lainnya (koalisi) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu yang berlaku.

Inilah kemudian yang menjadi latar belakang penelitian ini dilakukan. Penelitian yang berjudul *“KONFIGURASI POLITIK DALAM PENENTUAN ELECTORAL TRHESHOLD DALAM UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU”* ini akan diarahkan pada penelurusan terhadap penentuan *electoral trheshold* terkait

dengan pertarungan (konfigurasi) politik antar para elit di gedung dewan. Terkait dengan banyaknya penolakan terhadap persentase yang ditentukan, menjadikan penelitian ini juga akan menelusuri apakah penetapan persentase itu sesuai dengan perjalanan demokrasi yang diterapkan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana konfigurasi politik dalam penentuan *Electoral Trhesold* dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan konfigurasi politik dalam penentuan *Electoral Thresold* dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

D. Telaah Pustaka

Atas dasar pencarian refrensi dari beberapa penelitian dan pembahasan yang telah penyusun lakukan sebelumnya, penyusun mendapatkan beberapa karya tulis mengenai *Electoral Trhesold* yang bisa dijadikan refrensi untuk menyusun tulisan ini. Tetapi penyusun menjumpai adanya beberapa dari refrensi tersebut kemiripan dan perbedaan tentang judaul yang penyusun bahas. Oleh karena itu penyusun telah melakukan telaah pustaka terkait penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari adanya kesamaan

penelitian dan dapat menjadi sumber referensi dalam pembahasan yang penyusun teliti ini. Penelitian yang menjadi telaah pustaka antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Khalim Rozikin, tahun 2004 dengan judul “ Proses Demokratisasi Dalam Sistem Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Sar’iyyah”. Inti pembahasan dari skripsi ini adalah mengkritisi tentang sistem proporsional terbuka pasal 6 Undang-Undang pemilu tahun 2003. Sedangkan penelitian yang penyusun teliti lebih ke arah berkurang atau tidaknya esensi demokrasi di indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Rajab Ulumando, tahun 2014 yang berjudul “ Urgensi *Parlamentary Thresold* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial”. Skripsi ini membahas tentang konsep *Parlemantary Thresold* terhadap sistem pemerintahan presidensial di indonesia. Akan tetapi penyusun

¹⁹ Khalim Rozikin, “ Proses Demokratisasi Dalam Sistem Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Sar’iyyah”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2004.

lebih menyoroti ke arah *Electoral Thresold* dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Hakim tahun 2017, yang berjudul “Penyederhanaan Sistem Multi Partai Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*”, Skripsi ini membahas tentang konsep penyederhanaan partai politik dalam undang-undang No.7 tahun 2017 dalam perspektif *siyasah syar’iyyah* sesuai dengan prinsip *siyasah syar’iyyah* berupaya memperkuat partai politik yang berusaha ingin masuk ke parlemen sehingga tidak semua partai politik bisa masuk ke parlemen.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Faizi Zain tahun 2018, yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Pendaftaran Partai Politik dalam Peserta Pemilu tahun 2019”. Skripsi ini membahas tentang Penyelesaian sengketa proses pemilu dalam undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum mengenai pendaftaran partai

²⁰ Abdul Rajab Ulumando, “ Urgensi *Parlamentary Trhesold* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2014.

²¹ Abdul Hakim, “Penyederhanaan Sistem Multi Partai Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2017.

politik dalam peserta pemilu 2019 untuk mengetahui formulasi dan mekanisme yang jelas dan kongkrit dalam proses penyelesaiannya.²²

Jurnal yang ditulis oleh Ayon Diniyanto tahun 2018, yang berjudul “Mengukur Dampak Penerapan *Presidential Thresold* di Pemilu Serentak Tahun 2019”. Jurnal ini mengkaji tentang apakah pengaturan *Presidential Thresold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah sesuai dengan konstitusi dan membahas juga dampak dari *Presidential Thresold*.²³

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teori sebagai berikut:

1. Negara Hukum

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimuat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Pasal tersebut bermakna bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum

²² Faizi Zain, “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Pendaftaran Partai Politik dalam Peserta Pemilu tahun 2019)”.*Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2018.

²³ Ayon Diniyanto, “Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak 2019”, *jurnal* Indonesia State Law Review, vol.1, no.1, Oktober 2018.

(*Rechtsstaat*), yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan negara harus berlandaskan hukum. Di sisi lain, hal tersebut juga memiliki arti bahwa Negara Indonesia bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).²⁴ Karena Indonesia adalah negara hukum, maka setiap kebijakan politik harus berdasarkan hukum yang mengatur.

Menurut Satjipto Raharjo, prinsip negara hukum merupakan prinsip induk dari asas legalitas. Oleh karena itu, konsep negara hukum tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang jatuh dari langit begitu saja, melainkan ia lahir dari suatu falsafah komunitas sosial kultural.²⁵

Secara teori, pemikiran negara hukum dimulai sejak plato, ia mengatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah berdasarkan atas peraturan yang baik. Ia menyebutnya sebagai *nomoi*.²⁶ Menurut Frederich Julius Stahl mengungkapkan bahwa negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²⁷

²⁴ Sri Sumantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1992, hlm. 17.

²⁵ Satjipto Raharjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 22.

²⁶ Titik Triwulan T, Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 267.

²⁷ S. F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara Dimensi-Dimensi Pemikiran*, Yogyakarta, UII Press, 2001, hlm. 7.

- a. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (*grondrechten*)
- b. Adanya pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*)
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan hukum (*wetmatigheid an het bestuur*).

2. Demokrasi

Demokrasi sejauh ini masih diyakini menjadi sistem terbaik dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya sistem demokrasi ini di sebagian besar negara di dunia, sehingga banyak pakar yang membahas tentang demokrasi.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.²⁸

Mahfud MD dalam bukunya *Pilar-Pilar Demokrasi* menjelaskan bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang tak bisa dipisahkan dari hukum, dia mengibaratkan keduanya antara demokrasi dan hukum seperti dua sisi mata uang. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan

²⁸ Deliar Noer, *Pengantar Kepemikiran Politik*, Cet-1 Jakarta, CV Rajawali, 1983, hlm. 207.

baik bahkan dapat menimbulkan anarki, sebaliknya hukum tanpa sistem yang demokratis akan menjadi hukum yang eletis dan represif.²⁹

Sebagaimana yang telah penyusun singgung pada latar belakang masalah di atas, bahwa demokrasi memiliki dua elemen penting yaitu pemilihan umum dan partai politik.

Dalam sistem demokrasi pemilihan umum sangat penting diselenggarakan secara berkala dikarenakan ada beberapa sebab:

Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara. *Kedua*, di samping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. *Ketiga*, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula,

²⁹ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gama Media, 1999, hlm. 1-2.

belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri. Lagi pula, *keempat*, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.³⁰

3. Politik Hukum

Selanjutnya teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Politik Hukum. Politik hukum merupakan suatu kajian dalam bidang ilmu hukum yang terdiri dari dua disiplin ilmu yaitu ilmu hukum dan ilmu politik. Sebagaimana yang dimaksud oleh Mahfud MD, politik hukum merupakan *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.³¹

Dengan sudut pandang yang lain, kajian tentang hubungan kausalitas antara politik dan hukum sebagai sub sistem kemasyarakatan disebut-sebut, bahwa hukum sebagai produk politik. Dari pendekatan empirik, hal itu

³⁰ Jimly Asshiddiqie, Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No. 4, Jakarta, Desember 2006, hlm. 11-12.

³¹ Mahfud Md, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 2010, hlm. 1.

merupakan suatu aksioma yang tak dapat ditawar lagi. Tetapi ada juga para pakar hukum yang lebih percaya dengan semacam mitos bahwa politiklah yang harus tunduk pada aturan hukum. Inipun, sebagai *das sollen*, tak dapat disalahkan begitu saja. Bahwa hukum adalah produk politik sehingga keadaan politik tertentu akan melahirkan hukum dengan karakter tertentu pula. Kritik umum yang terlontar atas praktik hukum di Indonesia, terutama oleh kaum deterministik, meletakkan hukum sebagai alat kekuasaan. Fakta ini tentunya bisa dipahami, jikalau kita mengungkapkan sejumlah pelanggaran dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan aktivitas sosial dengan mengatasmakan hukum. Lihat saja bagaimana fenomena yang ditunjukkan oleh pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru dalam beberapa tahun menjalankan pemerintahan di Indonesia.

Selain politik hukum, teori dalam penelitian ini juga menggunakan teori suprastruktur dan infrastruktur politik sebagai berikut:³²

a. Suprasturuktur Politik

Dalam sistem politik dikena dengan yang namanya suprastruktur politik, banyak tokoh-tokoh ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang politik mendefinisikan mengenai suprastruktur politik. Tetapi menurut Miriam Budiardjo, suprastruktur merupakan bagian yang saling berkaitan dengan dengan tingkatan teratas dalam sebuah kelembagaan menjadi satu kesatuan.

Suprastruktur merupakan juga disebut sebagai mesin politik resmi (lembaga pembuat keputusan politik yang sah). Sistem politik ini sangat dibutuhkan agar pelaksanaan proses bernegara bisa berjalan sesuai tupoksinya masing-masing. Karena suprastruktur politik dapat membentuk regulasi yang mengatur negara berupa kebijakan publik.

³²Wawan Risnawan, Peran dan Fungsi Infrastruktur Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik, Jurnal Dinamika, Vol. 4, No. 3, September 2017, hlm. 514.

b. Infrastruktur Politik

Dalam siklus sistem politik dikenal dengan suatu rangkaian dan tindakan para pelaku politik untuk menentukan dan merumuskan, serta mengimplementasikan kebijakan publik. Kebijakan publik ini adalah *output* dari proses politik setelah mengkaji dan menerima masukan dari aspirator.

Adapun pengertian dari infrastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam aktivitasnya dapat mempengaruhi, baik langsung atau tidak langsung lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dimaksud adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi masyarakat (Ormas), partai politik, media massa, interest group, tokoh politik dan lain-lain yang bergerak secara independen.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*File Research Lecture*).³³

³³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Penerbit Rajawali, 1985, hlm. 15.

2. Objek penelitian

Objek yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah konfigurasi politik dalam penentuan aturan tentang *electoral threshold* sebagai salah satu syarat persyaratan partai politik lolos sebagai peserta pemilu 2019 melalui UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum pokok berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan aturan perundang-undangan yang berkaitan.
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus.

4. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan Yuridis-Politis, yaitu penelitian dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan dari pustaka yang relevan dengan pokok bahasan.
- b. Pendekatan politis, yaitu pendekatan dengan menganalisis berbagai kepentingan yang didapatkan berbagai pihak dari penetapan suatu aturan, dalam hal ini adalah aturan tentang *electoral threshold* dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Yaitu, data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (*content analysis*) dengan langkah menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan kemudian disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.³⁴

³⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet-II, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 6.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pada Bab Satu berisi tentang Pendahuluan yang mencakup tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan yang terakhir memuat tentang Sistematika Pembahasan.

Pada Bab Dua penyusun membahas mengenai Pemilihan Umum Sebagai Demokrasi di Indonesia, Pengertian dan Perkembangan Demokrasi, Elemen-Elemen Demokrasi, Tinjauan Umum Demokrasi di Indonesia dan Pemilihan Umum.

Pada Bab Tiga ini dibahas tentang Partai Politik, Partai Politik Pasca Amandemen, Infrastruktur Politik, Konfigurasi Politik pada masa Orde Lama, Orde Baru dan Pasca Reformasi.

Pada Bab Empat merupakan inti dari penelitian ini, yang mana akan menganalisis Konfigurasi Politik dalam Penentuan *Electoral Trhesold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Regulasi Politik Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Terakhir pada Bab Lima merupakan bab penutup, yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian terhadap Konfigurasi Politik Penentuan *electoral threshold* dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di atas, kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

Konfigurasi politik dalam penentuan aturan *electoral threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berdasarkan pada pembahasan panjang melalui fraksi partai politik yang ada di parlemen, dengan metode diskusi, kerjasama politik, dan kesamaan dalam memandang politik di Indonesia. Meski demikian, pengaturan *electoral threshold* dalam UU tersebut tidak terlepas dari bahan kritik karena dianggap merugikan partai-partai yang tidak memiliki wakil di parlemen.

Artinya partai yang memiliki kursi dominan secara otomatis juga memiliki suara dominan di dalam menentukan kebijakan di negara ini, dan sebaliknya partai yang memiliki suara minim di parlemen atau bahkan tidak sama sekali akan dirugikan oleh sistem pemilu kita saat ini. Misalnya, dalam

penentuan persentase *electoral threshold* pertama kali diusulkan oleh F-PDIP sebesar 4%.

Akhirnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disepakati ambang batas pada Pemilu 2019 sebesar 4%, persentase ini juga menentukan keikutsertaan partai pada pemilu selanjutnya. Sederhananya, konsekuensi yang diberikan dengan adanya penetapan ambang batas tersebut adalah, setiap partai yang tidak dinyatakan lolos parlemen, maka dalam pemilu selanjutnya dapat mengikuti pemilu dengan catatan berstatus seperti partai baru sebagaimana persyaratannya diatur dalam undang-undang pemilu dan peraturan KPU.

Adapun kekurangan dan kelebihan *electoral threshold* secara umum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih calon pemimpinnya, disebabkan oleh tingginya persentase yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara otomatis parpol juga akan berlomba-lomba mendula suara masyarakat. Sedangkan kekurangan dari *electoral threshold* Penerapan *electoral threshold* tidak memiliki konskuensi yang ketat, sebab partai yang tidak lolos ambang batas masih bisa mengikuti pemilu selanjutnya dengan status secara administrasi layaknya partai baru.

B. Saran-Saran

Dengan dilakukannya penelitian ini penyusun memandang perlunya memberikan saran yang membangun, yang mana dengan saran ini penyusun berharap dapat menjadi pertimbangan di DPR untuk merumuskan dan menerapkan *electoral threshold* di Indonesia.

Terlepas dari kebutuhan yang mendesak dengan munculnya banyak partai ketika masa transisi menuju reformasi, sistem penyelenggaraan negara di Indonesia telah teridentifikasi salah kaprah ketika menyandingkan sistem presidensial dengan sistem multipartai sejak masa reformasi. Oleh karenanya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku lembaga yang memiliki kebijakan dalam merumuskan undang-undang, ke depan melakukan pembenahan terhadap sistem *electoral threshold*. Salah satunya dengan penerapan *electoral threshold* yang lebih tegas dan memiliki konsekuensi terhadap partai politik di Indonesia.

Penyederhanaan partai melalui *electoral ehreshold*, meskipun urgen, harus dilakukan secara *soft* untuk menjamin sistem demokrasi yang tetap menjadi ukuran pembenaran dalam pembentukan aturan dengan *electoral threshold* itu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 paska amandemen, di akses pada 9 Agustus 2019.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, URL: peraturan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pasal 1 Angka 1 UU No 2 Tahun 2011 Perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pasal 415 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 414 dan 415 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

B. Pustaka

Abdul Gani, Muhammad, *Cita Dasar dan Pola Perjuangan Syarikat*, Jakarta, Penerbit Bulan Bintang, 1984.

_____, *Dilema Demokrasi Pluralis : Antara Otonomi dan Kontrol* (terj), Jakarta: Rajawali Press, 1982.

Abdulgani, Roeslan, *Demokrasi Indonesia, Tinjauan Politik, Sejarah, Ekonomi, Koperasi dan Kebudayaan*, Yogyakarta, Yayasan Widya Praha, 1995.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, cet. II, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

_____, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, 2006.

_____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005.

_____, *Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Jakarta, Volume III Nomor 4 Desember 2006.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Jakarta, Konstitusi Press, 2006.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Cet-II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet.XIV, Jakarta, PT. Gramedia, 2017.

_____, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Gramedia, 1981.

Dahl Robert A, *Demokrasi Ekonomi*, jilid II, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.

_____, *Demokrasi dan Para pengkritiknya*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1992.

Efendi Siregar, Amir, *Pers Mahasiswa, Patah tumbuh Hilang Berganti*, Jakarta, PT. Karya Unipress, 1983.

Gaffar, Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Hidayat, Syarif, Nur, dkk., *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*, makalah diskusi kelas pada mata kuliah Politik Ketatanegaraan, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta: Februari 2007.

J. Prihatmoko, Joko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.

Mahfud M. D, Moh., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2003.

_____, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Penerbit Gama Media, 1999.

- _____, 2018. *Politik Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- _____, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta, Penerbit Gama Media, 1999.
- _____, *Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 1998.
- Mannan, Bagir, dan Magnar, Kuntana, (editor), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1996.
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2004.
- Marbun, S. F., *Hukum Administrasi Negara Dimensi-Dimensi Pemikiran*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Marijan, K. 2012. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media, Cet. III
- Noer, Deliar, *Pengantar Kepemikiran Politik*, Cet-1 Jakarta: CV Rajawali, 1983.
- Noor, Deliar, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Jakarta, Grafiti, 1987.
- Notosusanto, Nugroho, *Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969*, Jakarta, Balai Pustaka, 1985.

- Nurtjahjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, cet-II, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2008.
- O'Donnell, Guillermo, dan C. Schmitter, Philippe, *Transisi Menuju Demokrasi : Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian* (terj.), Jakarta: LP3ES, 1993.
- Peldi Taher, Elza, *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Badan Wakaf Paramadina, 1994.
- Poerwanta, P.K., *Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1994.
- Poerwanta, P.K., *Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1994.
- Raharjo, Satjipto, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rais, Amien, *Demokrasi dan Proses Politik*, dalam Demokrasi dan Proses Politik, Seri Prisma Jakarta, diterbitkan LP3ES, 1986.
- RB, Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988.
- Romli, Lili, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

- Rusli Karim, M, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- S. Lev, Daniel, *Hukum Politik di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1990.
- Shadily, Hassan, *Eksiklopedi Umum*, cet-II, Jakarta, Yayasan Kanisius dan Yayasan Dana Buku Franklin, 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Penerbit Rajawali, 1985.
- Sumantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- Saragih, RB.2006. *Politik Hukum*. Bandung: Penerbit CV. Utomo, Bandung.
- Suyatno, *Menjelajahi Demokrasi*, Yogyakarta, Liebe Book Press, 2004.
- Syafi'i Ma'arif, A., *Islam di Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin* dalam Prisma No. 5 Tahun 1988.
- Triwulan , Titik, Gunadi Widodo, T, *Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ubaidillah dan Abdul Rozak, A, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE

UIN Syarif Hidayatullah dan The Asia Foendation, 2006.

Zulkifli, Arif, dkk, Seri Buku Tempo, Yap Thiam Hien, 100 Tahun Sang Pendekar Keadilan, Jakarta, PT. Gramedia, 2013.

C. Lain-Lain

Adelia, A. 2018. Relevansi Ambang Batas Parlemen (parliamentary

threshold) Dengan Sistem Presidensial di Indonesia. *Tesis* Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: 2018

Ari Dwipayana, AA, GN, *Mengenal Beberapa Sistem Pemilu*, URL: http://www.simpul-tangerang.org/dl_jump.php?id=12, diakses pada 9 Agustus 2019

Asshiddiqie, Jimly, Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No. 4, Jakarta: Desember 2006.

Asshiddiqie, Jimly, *Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi*, makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta 20 September 2005. Baca dalam <http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html>.

Asshiddiqie, Jimly, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, *makalah* dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Tema "Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar 14-18 Juli 2003.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, *KBBI Daring*, Pemutakhiran April 2019.

Choirul Azwar, Rully, Pembatasan Partai Politik Peserta Pemilu, *Makalah* dalam Talkshow "Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu: Multi Partai atau Pembatasan Partai Peserta Pemilu" yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Partai Politik dan Politisi untuk Reformasi, di Hotel Santika Jakarta, Rabu 20 September 2006.

Diniyanto, Ayon, "Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak 2019", *jurnal Indonesia State Law Review*, vol.1, no.1, t.tp: Oktober 2018.

Editor, Tim, *Agama dan Dialog antar Peradaban*, Jakarta, t.p., 1996.

Hakim, Abdul, "Penyederhanaan Sistem Multi Partai Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*", *Skripsi* Fakultas Syari'ah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2017.

Imadudin Rahmat, M, *dkk*, Partai-partai Islam; Tarnsformasi Gerakan Islam Dan Ruang Demokrasi, dalam *Tashwirul Afkar* edisi no.4, t.tp, 1999.

Jailani, Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan, *Jurnal Inovatif*, vol. VIII, no. I, Januari 2015.

KH Darwis, Ellyasa, *Multipartai, Koalisi dan Sistem Presidensial*, dalam <http://ellyasa.blogspot.com>, diakses 9 Agustus 2019.

Laporan Akhir Tim Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kelompok Kerja (POKJA) Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap Sistem Hukum Nasional dan Demokrasi di Indonesia.

Nababan, Asmara, *Reformasi Kepartaian untuk Perbaikan Representasi*, dalam <http://www.demosindonesia.org>

Rajab Ulumando, Abdul, “ Urgensi *Parlamentary Trhesold* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2014.

Risnawan, Wawan. Peran dan Fungsi Infrastruktur Politik dalam

Pembentukan Kebijakan Publik, Jurnal
Dinamika, Vol. 4, No. 3, September 2017

Rozikin, Khalim, “ Proses Demokratisasi Dalam Sistem Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasa Sar’iyyah”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2004.

Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang

Penyelenggaraan Pemilu, Rapat Kerja ke-19, Kamis 13 Juli 2017, Pukul 14.30 s.d selesai, hlm 801

Siahaan, Nico, Handani, *Formula Penyederhanaan Jumlah Partai Politik di Parlemen pada Pemilihan Umum Indonesia*, Jurnal Politika, Vol.7, No.1, April 2016.

Siti zuhro, R., Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 16, No. 1 Juni 2019.

Sufriadi, Demokrasi, *makalah* diskusi internal Ikatan Mahasiswa dan Masyarakat Aceh Tenggara, Yogyakarta: 20 Maret 2009.

Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Panitia Penerbit
Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid II.

Sudjito, Arie, *Reformasi Parpol dan Soal Calon
Independen*, dalam <http://www.berpolitik.com>

Zain, Faizi, “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum (Studi Pendaftaran
Partai Politik dalam Peserta Pemilu tahun
2019”.*Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Yogyakarta: 2018.

<https://tirto.id/pemilu-1999-parpol-islam-dan-nasionalis-berlaga-tanpa-komunis-cMU>, dilansir pada 25 Juni 2019

Zuhri, Sholehudin, Proses Politik Dalam Pembentukan
Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan
Kekuasaan pada Pembentukan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, *Jurnal
Wacana Politik*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2018.

<https://detik.com/news/sudah-disahkan-ini-5-isu-krusial-di-uu-pemulu>, dilansir pada 21/07/2017.

<http://www.dpr.go.id/majalahparlementaria/index.php>

<https://nasional.kompas.com/read/ini-lima-opsi-ambang-batas-parlemen->

pemilu-2019. Dilansir pada 11 Januari 2017

Lazuardi, Glery. 2018. Parpol Baru Belum Dapat Mengusung Capres, Ini

Konsekuensinya. diakses dari
<http://www.tribunnews.com/nasional>

/2018/05/24/parpol-baru-belum-dapat-mengusung-capres-ini konsekuensinya diakses pada tanggal 17 September 2018

CURICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Anwar Amien
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat Tanggal Lahir : Kuning, 10 November 1993
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Tinggi Badan : 169 CM
7. Berat Badan : 55 KG
8. Agama : Islam
9. Alamat : Desa Lawe Hijo,
Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara,
Provinsi Aceh.
10. Nomor HP : 085358662266
11. Email :
anwaramien93@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- MIN Kota Kutacane (1999-2005)
- MtsS Nurul Islam (2005-2008)
- MAS Nurul Islam (2008-2011)
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2012-sekarang)

C. Riwayat Organisasi

- Ketua Umum Ikatan Masyarakat dan Mahasiswa Aceh Tenggara Yogyakarta (IKAMARA) Periode 2014-2016
- Sekretaris I Taman Pelajar Aceh Yogyakarta (TPA) Periode 2014-2017
- Dewan Pembina Komunitas Mahasiswa Nanggroe Aceh Darussalam UIN Sunan Kalijaga (KOMNAD) Periode 2015-2017
- Anggota Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga